

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau. Transportasi publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan lalu lintas mulai dari mengurangi kepadatan kendaraan hingga mencegah kecelakaan lalu lintas oleh kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur meluncurkan Trans Jatim sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Jawa Timur dengan skema *buy the service* khususnya di wilayah Gerbangkertosusila. Layanan ini dioperasikan oleh operator yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melalui pola *scrapping*. Trans Jatim Koridor III (Mojokerto-Gresik) menjadi transportasi publik perintis dengan operator dari PT Yukida Multi Sinergy.

Proses *collaborative governance* terbentuk dalam layanan Trans Jatim Koridor III antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan PT Yukida Multi Sinergy serta masyarakat yang menjadi pengguna layanan Trans Jatim Koridor III sebagai berikut:

1. Dinamika kolaborasi pada layanan Trans Jatim Koridor III berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan adanya legitimasi kesepakatan kerja sama. Selain itu, pada dinamika kolaborasi juga terdapat forum untuk mengevaluasi serta membentuk keputusan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan.
2. Tindakan kolaborasi pada layanan Trans Jatim Koridor III berjalan efektif dengan peran penting dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan PT Yukida Multi Sinergy dalam menyiapkan operasional layanan serta untuk

mewujudkan nilai 6K yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Trans Jatim.

3. Dampak pada proses kolaborasi meliputi dampak yang diharapkan dari layanan Trans Jatim Koridor III adalah berhasil mengatasi masalah lalu lintas di Jawa Timur. Kemudian dampak yang tidak diharapkan dari layanan Trans Jatim Koridor III yaitu *load factor* 2023-2024 yang belum memenuhi target dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Serta dampak tidak terduga dari layanan Trans Jatim Koridor III yaitu adanya lonjakan penumpang pada hari-hari tertentu. Adanya berbagai kendala yang dapat mengganggu performa layanan mengharuskan *stakeholder* layanan untuk melakukan adaptasi seperti upaya dalam meningkatkan *load factor* Trans Jatim Koridor III, mengatasi lonjakan penumpang pada hari tertentu, serta mengatasi aduan dari pengguna layanan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian, terdapat beberapa saran dari penulis untuk layanan Trans Jatim Koridor III yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Trans Jatim perlu mengevaluasi mengenai waktu tunggu bus yang menjadi semakin lama karena adanya pengurangan jumlah unit bus pada koridor III dengan mempersingkat interval bus pada jam-jam tertentu seperti di jam berangkat dan pulang kerja.
2. Sebagai *stakeholder* yang menyiapkan sarana prasarana halte, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur perlu menambahkan tempat duduk pada halte Trans Jatim Koridor III untuk meningkatkan kenyamanan penumpang

yang sedang menunggu kedatangan bus serta memperbaiki Halte Kedungrukem yang kurang memadai ketika musim hujan.

3. Terkait rencana sosialisasi pentingnya penggunaan transportasi publik ke sekolah-sekolah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur perlu menggandeng operator layanan dalam pelaksanaannya sehingga tidak hanya membahas layanannya tapi juga spesifikasi busnya. Selain itu, kerja sama juga bisa dilakukan dalam bentuk penerimaan siswa Sekolah Menengah Keatas (SMK) untuk magang atau parktik kerja di kantor layanan hingga mekanik Trans Jatim.
4. Berdasarkan pengamatan penulis, Manajemen Trans Jatim perlu memperbaiki waktu distribusi informasi jam operasional pelayanan Trans Jatim melalui akun instagram [@officialtransjatim](#) lebih pagi lagi atau h-1 operasional layanan. Sebab saat ini pendistribusian informasinya terlalu siang bahkan sore padahal informasi yang disampaikan bertujuan untuk operasional hari tersebut.